

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk pada setiap wilayah akan sulit untuk dikendalikan. Pertumbuhan penduduk merupakan ciri kecenderungan perkembangan wilayah di Indonesia, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya yang berlangsung dengan pesat. Keadaan ini akan terus berkembang sehingga berimplikasi pada kebutuhan spasial untuk kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas lainnya.

Menurut Bintarto (1987) salah satu masalah kependudukan pada daerah perkotaan maupun perdesaan yang sering dibahas adalah permukiman. Perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk yang dialami akan menimbulkan masalah permukiman terutama masalah daerah permukiman atau hunian yang padat dan tidak terkontrol yang berkembang dan mengakibatkan perubahan pada tingkat kualitas lingkungan serta menurunnya kualitas lingkungan permukiman.

Salah satu penyebab masalah permukiman ini adalah akibat adanya perilaku manusia dalam pemenuhan kebutuhan lahan permukiman yang semakin mendesak, serta kebutuhan faktor sosial ekonomi masyarakat. Di antaranya adalah penambahan perluasan permukiman juga penambahan perumahan baru, penambahan fasilitas perdagangan seperti jumlah pasar, pertokoan dan swalayan serta fasilitas lainnya. Akibatnya akan menimbulkan semakin tidak diperhatikannya lingkungan permukiman dan akan menimbulkan tata letak permukiman yang tidak teratur permukiman bertambah padat yang dapat menyebabkan kondisi lingkungan permukiman buruk.

Kondisi lingkungan permukiman yang buruk merupakan suatu permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian, baik secara teknis maupun non teknis. Dimana masyarakat yang tinggal di kawasan lingkungan permukiman yang tidak layak huni karena kualitas bangunan, sarana, prasarana, utilitas lingkungan serta penunjang kegiatan fungsi lain yang tidak memenuhi syarat.

Adapun parameter atau kriteria yang diukur dalam menentukan kualitas lingkungan suatu permukiman berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya (2014) mengenai kategori kumuh dan prioritas kawasan permukiman kota Tanjungbalai yaitu dilihat dari kategori (1) kepadatan penduduk, (2) kondisi bangunan meliputi : (a) kepadatan bangunan, (b) tata letak bangunan, dan (c) kelayakan fisik bangunan, (3) aksesibilitas, serta (4) sarana-prasarana meliputi : (a) lokasi permukiman (b) sanitasi, (c) fasilitas umum, (d) ketersediaan air bersih, (e) drainase lingkungan dan (f) pengelolaan persampahan.

Strategi penanganan pada permukiman merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan perencanaan serta pelaksanaan permukiman perkotaan maupun perdesaan yang layak huni. Strategi yang dilakukan pada penanganan lingkungan permukiman ini dapat berupa pembenahan lingkungan, partisipasi masyarakat maupun menentukan solusi dari permasalahan.

Kota Tanjungbalai merupakan kota madya yang menjadi pusat aktivitas social ekonomi dan bermukimnya masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah penduduk di Kota Tanjungbalai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 terdapat jumlah penduduk 171.187

jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 2.829 jiwa/km², hal ini mengakibatkan terjadinya perluasan kawasan permukiman dengan minimnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman mengakibatkan munculnya penurunan kualitas lingkungan kawasan permukiman.

Kecamatan Teluk Nibung merupakan salah satu Kecamatan di Kota Tanjungbalai yang memiliki permukiman kumuh yang cukup signifikan tinggi. Kecamatan Teluk Nibung terdiri dari lima kelurahan, yaitu Kelurahan Beting Kuala, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Perjuangan dan Kelurahan Sei Merbau dengan luas wilayah 12,55 km² dan jumlah penduduk 39.682 jiwa serta kepadatan penduduk mencapai 3.162 jiwa/km² (BPS Kecamatan Teluk Nibung dalam Angka 2019).

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya (2014) kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Teluk Nibung tercatat pada kelurahan Beting Kuala dengan luasan kumuh 14,8 ha, kelurahan Kapias Pulau Buaya dengan luasan kumuh 35,06 ha, kelurahan Pematang Pasir dengan luasan kumuh 9,87 ha, kelurahan Perjuangan dengan luasan kumuh 10,11 ha dan kelurahan Sei Merbau dengan luasan kumuh 28,49 ha dengan tingkat kekumuhan kumuh sedang.

Kelurahan Kapias Pulau Buaya memiliki luasan kawasan kumuh yang cukup luas dan cenderung kumuh dengan kawasan padat penduduk dan kondisi permukiman pada bantaran sungai, kumuh dan tidak tertata. Juga terdapat permukiman rawan banjir akibat adanya pasang-surut air sungai, sedangkan perumahan dan permukiman di daerah sempadan sungai tidak tertata. Untuk utilitas umum yaitu akses jalan lingkungan yang rusak dan tidak terawat sehingga

terkesan kumuh dan kotor. Pada sarana dan prasarana dengan permasalahan limbah rumah tangga umumnya di buang ke parit depan rumah dan dialirkan ke sungai. Sebagian drainase yang sudah ada cenderung buruk sehingga muncul genangan di beberapa lokasi. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan kondisi bangunan rumah-rumah di Kelurahan Kapias Pulau Buaya mengalami penurunan kualitas.

Adapun strategi penanganan lingkungan permukiman pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai adalah mengembangkan permukiman sejalan dengan pengembangan jalan lingkaran utara, lingkaran selatan dan jalan arteri. Pengendalian pengembangan permukiman di sektor industri dan pelabuhan, pengendalian pengembangan permukiman pada daerah rawan banjir tahunan dan pasang surut, serta menata permukiman sempadan sungai dan rel kereta api. Namun strategi penanganan lingkungan permukiman tersebut kurang optimal disebabkan terbatasnya kemampuan penyedia prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian kondisi lingkungan permukiman di Kelurahan Kapias Pulau Buaya maka perlu dilakukan penelitian kualitas lingkungan permukiman yang berjudul “Analisis kualitas lingkungan permukiman dan strategi penanganannya di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai” guna mendapatkan informasi terbaru mengenai kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Kapias Pulau Buaya serta strategi penanganannya menuju permukiman dan lingkungan yang lebih baik.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Permukiman tidak tertata berada di sekitar bantaran sungai sehingga terlihat kotor dan kumuh;
2. Tipologi kawasan permukiman dengan kawasan strategis minim infrastruktur;
3. Menurunnya kualitas sarana dan prasarana permukiman yakni drainase permukiman yang belum memadai;
4. Sebagian besar permukiman berada dikawasan rawan banjir dan genangan air serta menempati bantaran sungai terlihat kumuh;
5. Strategi penanganan lingkungan permukiman kurang optimal serta terbatasnya kemampuan penyedia prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman oleh pemerintah.

C. Batasan Masalah

Batasan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Kualitas lingkungan permukiman berdasarkan parameter kualitas lingkungan permukiman.
2. Strategi penanganan kualitas lingkungan permukiman.

D. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai berdasarkan parameter kualitas lingkungan permukiman?

2. Bagaimana strategi penanganan kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai berdasarkan parameter kualitas lingkungan permukiman.
2. Untuk mengetahui strategi penanganan kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini sebagai bahan referensi serta sumber bacaan di lingkungan FIS Unimed.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mahasiswa.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan atau masukan pemerintah Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.